

**RENCANA KERJA  
DINAS PERINDUSTRIAN,  
PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM  
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI dan UKM  
Jl. Sengkawit Raya Komplek Pasar Induk Tanjung Selor Kode Pos 77212  
TANJUNG SELOR**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa ALLAH.S.W.T atas segala rahmat dan karunianya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat didalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022, yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas selama 1 (Satu) tahun . Rencana Kerja (RENJA) Dinas Peindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tidak luput dari kekurangan – kekurangan, namun demikian telah diupayakan semaksimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut melalui koordinasi antar Bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM.

Tanjung Selor, 18 Agustus 2021

Plt. Kepala Dinas



Ir. Hasriyani, SH., MM  
Pembina TK. I, IV/b  
NIP. 19730717 200312 2 008

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU .....</b>	<b>7</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	32
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	33
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	37
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	56
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>57</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi .....	57
3.1.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	57
3.1.2 Telaahan terhadap Prioritas Provinsi.....	61
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	69
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>71</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019- 2020 .....	7
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 .....	15
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	32
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Utara.....	37
Tabel 2.4	Usulan Program kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Utara .....	56
Tabel 3.1	Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 yang mendukung Prioritas Nasional .....	57
Tabel 3.2	Indikasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022 Yang Mendukung Sepuluh Prioritas Daerah .....	62
Tabel 6	Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 .....	71

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat pasal 272 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dan pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja organisasi perangkat daerah (Renja) Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara 2021-2026. Menurut pasal 273 Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam penyusunan rancangan rencana kerja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD, rencana kerja perangkat daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah ditetapkan kepala daerah setelah RKPD ditetapkan, Sejalan dengan pengertian tersebut, dokumen Renja Disperindagkop dan UKM tahun 2022 adalah dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan Disperindagkop dan UKM dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi pokok. Dokumen Renja 2022 menjadi acuan bagi Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Utara dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung program pembangunan pemerintah daerah dalam

rangka mewujudkan Visi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yaitu ***“Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera”*** didalam Renja ini memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD 2022.

## **1.2. Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana kerja tahunan ini, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 13/PER/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 10 Tahun

2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 – 2038.

12. Surat Edaran Gubernur No. 045/1187/BAPP-LIT/GUB Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 untuk memberikan arah kebijakan pembangunan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM selama 1 (satu) tahun, yang disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022, sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi kinerja pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara hingga tahun 2022.
- b. Menjabarkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah kedalam program dan kegiatan disertai lokasi, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif tahun 2022 dan prakiraan tahun 2023.
- c. Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022.
- d. Menjadi pedoman penyusunan RKA OPD Tahun Anggaran 2022; dan
- e. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.



#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penyajian rencana kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

##### **Bab I   Pendahuluan**

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### **Bab II   Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Pada bab ini dijelaskan mengenai hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah serta capaian sasaran Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya.

##### **Bab III   Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Pada bab ini dijelaskan mengenai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah pada tahun rencana serta rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai lokasi, kelompok sasaran dan pagu indikatif.

##### **Bab IV   Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Pada bab ini dijelaskan mengenai rencana kerja/langkah-langkah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mencapai target yang ditetapkan serta sumber-sumber pendanaan dan alternatif pembiayaan program dan kegiatan.

## **Bab V Penutup**

Pada bagian ini Bab ini berisi catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta kaidahkaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil pelaksanaan evaluasi renja perangkat daerah tahun 2020 sebesar 90,28% karena perbedaan nomenklatur antara rencana kerja tahun 2021 dan rencana kerja tahun n-2 dan tahun n-1 maka rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja tahun n-2 dan tahun n-1 ditampilkan pada table 2.1 sebagai berikut :

*Tabel 2.1*

*Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2019-2020*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun berjalan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3) (2019)	Target dan realisasi Kinerja dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun n-2			Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renjda PD Tahun n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja PD Tahun (2020) (n-2)	Realisasi PD Tahun (n-2) (2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan s / d tahun berjalan ( tahun n-1 )	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2015-2021 (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2.11 . 3.07.01.01 . 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah*	Persentase pertumbuhan UKM baru	100 %	42.73 %	25 %	13.31 %	53%	0	56.04 %	56%	

2.11 . 3.07.01.01 . 16 . 03	Peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah	jumlah Usaha Kecil yang difasilitasi kemitraan usahanya	55      Pelaku Usaha	30      Pelaku Usaha	0      Pelaku Usaha	0      Pelaku Usaha	0%	0	30      Pelaku Usaha	55%
2.11 . 3.07.01.01 . 16 . 06	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Pelatihan kewirausahaan yang diikuti KUMKM	40      Kegiatan	8      Kegiatan	8      Kegiatan	8      Kegiatan	100%	0	16      Kegiatan	40%
2.11 . 3.07.01.01 . 16 . 07	Pelatihan Manajemen Pengelolaan koperasi/KUD	Jumlah Pengurus Koperasi yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi/KUD	30      Pengurus	0      Pengurus	30      Pengurus	30      Pengurus	100%	0	30      Pengurus	100%
2.11 . 3.07.01.01 . 16 . 08	Sosialisasi HAKI kepada usaha mikro kecil menengah	Jumlah UMKM yang Mengikuti Sosialisasi	20      UMKM	0      UMKM	25      UMKM	25      UMKM	100%	0	25      UMKM	125%
2.11 . 3.07.01.01 . 16 . 12	Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM	Jumlah Promosi Produk yang dilakukan	4      Kegiatan	1      Kegiatan	1      Kegiatan	1      Kegiatan	100%	0	2      Kegiatan	50%
2.11 . 3.07.01.01 . 16 . 18	Sosialisasi dukungan informasi penyesuaian permodalan	Jumlah Peserta Sosialisasi Dukungan informasi penyesuaian permodalan	30      Orang	0      Orang	30      Orang	30      Orang	100%	0	30      Orang	100%
2.11 . 3.07.01.01 . 18	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**</b>	<b>Persentase koperasi aktif</b>	<b>69      %</b>	<b>63.97      %</b>	<b>72      %</b>	<b>67.8      %</b>	<b>94%</b>	<b>0</b>	<b>131.78      %</b>	<b>191%</b>
2.11 . 3.07.01.01 . 18 . 05	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah laporan monitoring evaluasi	110      Koperasi	0      Koperasi	10      Koperasi	10      Koperasi	100%	0	10      Koperasi	9%
2.11 . 3.07.01.01 . 18 . 09	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monitoring evaluasi	46      Laporan	1      Laporan	4      Laporan	4      Laporan	100%	0	5      Laporan	11%

3.06 . 3.07.01.01 . 15	<b>Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan*</b>	<b>Persentase Peredaran Barang/Jasa yang tidak memenuhi syarat ketentuan jual</b>	<b>35 %</b>	<b>0.00 %</b>	<b>0 %</b>	<b>0.00 %</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0%</b>	
3.06 . 3.07.01.01 . 15 . 01	Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	Jumlah Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	5 Raker	1.00 Raker	1 Raker	1 Raker	100%	0	2 Raker	40%	
3.06 . 3.07.01.01 . 15 . 02	Penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	Jumlah fasilitasi penyelesaian masalah konsumen oleh BPSK	36 Bulan	12.00 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	0	24 Bulan	67%	
3.06 . 3.07.01.01 . 15 . 03	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan jasa	Jumlah Pengawasan dan sosialisasi Peredaran barang dan jasa	25 Kegiatan	5.00 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%	0	10 Kegiatan	40%	
3.06 . 3.07.01.01 . 17	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor*</b>	<b>Persentase Peningkatan Jenis Komoditi Ekspor</b>	<b>48 %</b>	<b>36.39 %</b>	<b>46 %</b>	<b>42.3 %</b>	<b>92%</b>	<b>0</b>	<b>78.66 %</b>	<b>164%</b>	
3.06 . 3.07.01.01 . 17 . 02	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	Jumlah Sistem Informasi Peluang Pasar yang dikelola	3 Sistem	1.00 Sistem	1 Sistem	0 Sistem	0%	0	1 Sistem	33%	
3.06 . 3.07.01.01 . 17 . 08	Membangun jejaring dengan eksportir	Jumlah Asosiasi Eksporti Per-Komoditi	4 Asosiasi	Asosiasi	2 Asosiasi	1 Asosiasi	50%	0	1 Asosiasi	25%	
3.06 . 3.07.01.01 . 17 . 12	Pembangunan promosi perdagangan Internasional	Jumlah Kegiatan Promosi yang dilakukan	13 Kegiatan	4.00 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	0	5 Kegiatan	38%	

3.06 . 3.07.01.01 . 17 . 13	Peningkatan kapasitas pelaku usaha perdagangan internasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perdagangan Internasional	64 Orang	0 Orang	32 Orang	32 Orang	100%	0	32 Orang	50%
3.06 . 3.07.01.01 . 17 . 14	Pengelolaan Isu-isu Perdagangan Internasional	Jumlah Koordinasi Pengelolaan Isu-isu Perdagangan Internasional	42 Koordinasi	0 Koordinasi	10 Koordinasi	10 Koordinasi	100%	0	10 Koordinasi	24%
3.06 . 3.07.01.01 . 18	<b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri*</b>	<b>Persentase usaha perdagangan dalam negeri yang dibina</b>	<b>11 %</b>	<b>7.98 %</b>	<b>9 %</b>	<b>8.2 %</b>	<b>91%</b>	<b>0</b>	<b>16.13 %</b>	<b>147%</b>
3.06 . 3.07.01.01 . 18 . 01	Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional	Jumlah Perangkat, Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan Operasional yang dibuat	1 Kebijakan	0 Kebijakan	1 Kebijakan	0 Kebijakan	0%	0	0 Kebijakan	0%
3.06 . 3.07.01.01 . 18 . 03	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang / Produk	Jumlah Pelaku Usaha yang memperoleh Sarana Perdagangan	180 Pelaku Usaha	70 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0%	0	70 Pelaku Usaha	39%
3.06 . 3.07.01.01 . 18 . 04	Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan	Jumlah Kegiatan pendistribusian barang yang diawasi	15 Kegiatan	9 Kegiatan	3 Kegiatan	1 Kegiatan	33%	0	10 Kegiatan	67%
3.06 . 3.07.01.01 . 18 . 06	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah sarana informasi Perdagangan yang terbangun	2 Sarana Informasi	Sarana Informasi	1 Sarana Informasi	1 Sarana Informasi	100%	0	1 Sarana Informasi	50%
3.06 . 3.07.01.01 . 18 . 07	Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi	115 Orang	0 Orang	40 Orang	0 Orang	0%	0	0 Orang	0%

3.06 . 3.07.01.01 . 18 . 08	Pembangunan Pasar Rakyat	Jumlah Pasar yang dibangun	4      Pasar	2      Pasar	4      Pasar	4      Pasar	100%	0	6      Pasar	150%	
3.06 . 3.07.01.01 . 18 . 09	Kegiatan Pasar Murah	Jumlah Kegiatan Pasar Murah yang dilaksanakan	34      Kegiatan	2      Kegiatan	12      Kegiatan	12      Kegiatan	100%	0	14      Kegiatan	41%	
3.07 . 3.07.01.01 . 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase penyerapan anggaran program seiring makin efektifnya pengalokasian anggaran</b>	<b>90      %</b>	<b>100.00      %</b>	<b>100      %</b>	<b>100      %</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>	<b>200      %</b>	<b>222%</b>	
3.07 . 3.07.01.01 . 01 . 01	penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim	232      Surat	55.00      Surat	50      Surat	60      Surat	120%	0	115      Surat	50%	
3.07 . 3.07.01.01 . 01 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	60      Bulan	12.00      Bulan	12      Bulan	12      Bulan	100%	0	24      Bulan	40%	
3.07 . 3.07.01.01 . 01 . 07	Pelayanan jasa administrasi keuangan	Jumlah bulan penyediaan administrasi jasa keuangan	60      Bulan	12.00      Bulan	12      Bulan	12      Bulan	100%	0	24      Bulan	40%	
3.07 . 3.07.01.01 . 01 . 09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan / mesin yang dilakukan Perbaikan / Service	40      Unit	10.00      Unit	10      Unit	10      Unit	100%	0	20      Unit	50%	
3.07 . 3.07.01.01 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah bulan penyediaan alat tulis kantor yang disediakan	60      Bulan	10.00      Bulan	12      Bulan	12      Bulan	100%	0	22      Bulan	37%	
3.07 . 3.07.01.01 . 01 . 11	Penyediaan Brang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60      Bulan	10.00      Bulan	12      Bulan	12      Bulan	100%	0	22      Bulan	37%	

3.07 . 3.07.01.01 .01 . 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	71 Unit	17.00 Unit	15 Unit	15 Unit	100%	0	32 Unit	45%
3.07 . 3.07.01.01 .01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tanggayang disediakan	500 Unit	10.00 Unit	100 Unit	100 Unit	100%	0	110 Unit	22%
3.07 . 3.07.01.01 .01 . 15	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	87 Eksemplar	12.00 Eksemplar	36 Eksemplar	36 Eksemplar	100%	0	48 Eksemplar	55%
3.07 . 3.07.01.01 .01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	5360 Porsi	1,100.00 Porsi	1130 Porsi	1070 Porsi	95%	0	2170 Porsi	40%
3.07 . 3.07.01.01 .01 . 18	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	420 Kali	100.00 Kali	63 Kali	72 Kali	114%	0	172 Kali	41%
3.07 . 3.07.01.01 .01 . 19	Rapat - rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan di dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan pengawasan di dalam daerah	465 Kali	82.00 Kali	172 Kali	170 Kali	99%	0	252 Kali	54%
3.07 . 3.07.01.01 .01 . 22	Rapat Teknis Indagkop se Kalimantan Utara	Jumlah Rapat Teknis dan Laporan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Sektor Perdagangan indagkop se - Provinsi Kalimantan Utara yang dilaksanakan	250 Orang	60.00 Orang	60 Orang	60 Orang	100%	0	120 Orang	48%



3.07 . 3.07.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase penyerapan anggaran program seiring makin efektifnya pengalokasian anggaran (Sarana dan Prasarana)	100 %	100.00 %	100 %	100 %	100%	0	200 %	200%	
3.07 . 3.07.01.01 . 02 . 11	Penyewaan Rumah / Gedung / Gudang Parkiran Kantor Dinas	Jumlah rumah/gedung/gudang/ parkiran kantor dinas yang disewa	1 Unit	1.00 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	0	2 Unit	200%	
3.07 . 3.07.01.01 . 02 . 24	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	16 Unit	16.00 Unit	16 Unit	16 Unit	100%	0	32 Unit	200%	
3.07 . 3.07.01.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	82 %	87.00 %	82 %	89.0 %	109%	0	176 %	215%	
3.07 . 3.07.01.01 . 05 . 01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal	76 Orang	15.00 Orang	5 Orang	3 Orang	60%	0	18 Orang	24%	
3.07 . 3.07.01.01 . 16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah*	Persentase industri kecil dan menengah yang sehat	35 %	29.60 %	32	31.8 %	99%	0	61.4 %	175%	
3.07 . 3.07.01.01 . 16 . 06	Pembinaan dan Pengembangan bagi Pelaku Industri kecil dan Menengah	jumlah IKM yang melakukan kemitraan dengan perusahaan	100 IKM	10.00 IKM	15 IKM	15 IKM	100%	0	25 IKM	25%	

3.07 . 3.07.01.01 . 16 . 10	Penyediaan Sarana Maupun Prasarana Klaster Industri	Jumlah sarana penunjang dari klaster industri yang terbangun	1 Sarana	1.00 Sarana	1 Sarana	1 Sarana	100%	0	2 Sarana	200%
3.07 . 3.07.01.01 . 17	<b>Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri*</b>	<b>Persentase IKM yang menerapkan IPTEK</b>	10 %	0.07 %	9 %	0.1 %	1%	0	0.156 %	2%
3.07 . 3.07.01.01 . 17 . 03	perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur	Jumlah Sosialisasi, Fasilitasi, Bimtek/Pelatihan dalam penerapan SNI pada bidang industri/IKM	3 Sosialisasi/ bimtek	2.00 Sosialisasi / bimtek	1 Sosialisasi / bimtek	1 Sosialisasi/ bimtek	100%	0	3 Sosialisasi / bimtek	100%

Pada saat renja ini disusun evaluasi renja 2021 belum dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran, dengan demikian maka evaluasi renja perangkat tahun ini belum dapat disajikan, hanya table 1, 2, 3 dan 4 saja yang bisa disajikan pada table 2.2, sebagai berikut :

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra  
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun berjalan	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub Kegiatan s/d Tahun (n-3)	Target dan realisasi Kinerja dan Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun n-2			Target Program dan Kegiatan/ Sub Kegiatan (Renjda PD Tahun n-1)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan (Renjda PD Tahun n-1)				Realisasi Capaian Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan s / d tahun berjalan ( tahun n-1 )	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Target Renja PD Tahun	Realisasi PD Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			
					(n-2)					
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									

2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%								
2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	17 Dokumen								

2.17.01.1. 01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen							
2.17.01.1. 01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	13 Dokumen							
2.17.01.1. 01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen							

2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan							
2.17.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan							
2.17.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah layanan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan							
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan							

2.17.01.1. 05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	80 Stel							
2.17.01.1. 05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 Orang							
2.17.01.1. 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	12 Bulan							

2.17.01.1. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	13 Unit							
2.17.01.1. 06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 Bulan							
2.17.01.1. 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan							
2.17.01.1. 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan							



2.17.01.1. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang disediakan	2160 Eksemplar							
2.17.01.1. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 kali							
2.17.01.1. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	0							

2.17.01.1. 07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	0							
2.17.01.1. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah yang disediaka n	12 Bulan							
2.17.01.1. 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan Jasa Surat Menyurat yang disediaka n	1640 pcs							

2.17.01.1. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediaka n	12 Bulan							
2.17.01.1. 08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang disediaka n	15 Unit							

2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya	12 Bulan								
2.17.01.1.09.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	0 Unit								

2.17.01.1. 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya	15 Unit							
2.17.01.1. 09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dilakukan pemeliharaan/ direhabilitasi	4 Ruangan							

2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	persentase Jumlah koperasi yang melakukan RAT	18,28							
2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Persentase Koperasi yang tertib administrasi	60%							

[illegible]

2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pengurus/ pengawas yang menyampaikan RAT	50%								
---------	--	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--



2.17.05.1. 01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dal 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pengurus , Pengawas dan anggota Koperasi yang bersertifikat	50 Peserta								
------------------	---	--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2.17.03.1. 01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Pengurus, Pengawas dan anggota Koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan Perkoperasian	50 Peserta							
---------------------	---	--	------------	--	--	--	--	--	--	--

2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase i UMKM yang mengakses KUR	54,67							
---------	---	--------------------------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--

2.17.07.1. 01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang mendapatkan KUR	55 UMKM								
------------------	--	----------------------------------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

2.17.07.1. 01.01	Menumbuhkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengent	Jumlah UMKM yang difasilitasi dalam mengakses KUR	55 UMKM							
---------------------	---	---	---------	--	--	--	--	--	--	--

	asan Kemiskin an									
2.17.08	Program Pengemban gan UMKM	Persentas e UMKM yang diberikan pelatihan peningkat an daya saing dan fasilitasi pemasara n hasil produk UMKM	3,5%							

2.17.08.1. 01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientsi Peningkatan Skala Usaha menjadi Menengah	Jumlah Usaha Kecil yang meningkat menjadi Usaha Menengah	31								
------------------	---	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

2.17.08.1. 01.01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UMK M yang diberikan pelatihan/pendampingan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya manusia, serta Desain dan Teknologi	360								
---------------------	---	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--



3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																		
3.30	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	kontribusi nilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) dalam 1 (satu) tahun	90%																
3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Penggunaan Form Certificate of Origin (COO)/Surat Keterangan Asal (SKA) dalam 1 (satu) Tahun	2.652																
3.30.02.1.04.01	Koordinasi dan sinkronisasi Layanan Penerbitan Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Pelaku Usaha yang terlayani	70 Pelaku Usaha/UKM																
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan Yang terbangun	25%																
3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas	Jumlah Pembangunan dan pusat distribusi regional dan provinsi yang dikelola	1 Lokasi																
3.30.03.1.01.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana pusat distribusi provinsi yang disediakan atau dibangun	17 Lokasi																

3.30.03.1. 01.01	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah pembinaan dan pengendalian pusat distribusi yang dilaksanakan	0 Kegiatan									
3.30.04	STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Inflasi Pangan Bergejolak	$3 \pm 1$									
3.30.04.1. 01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar waktu	6%									
3.30.04.1. 01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Waktu	<13%									
3.30.04.1. 01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Koefisien Variasi Harga Barang Penting Antar Waktu	0									

3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar wilayah	6%									
3.30.04.1.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota	Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Wilayah	0									
3.30.04.1.02.02	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah operasi pasar yang dilaksanakan	10 Kali									
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor Kalimantan Utara	16%									

3.30.05.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi	196 Pelaku Usaha									
3.30.05.1.01.01	Pameran Dagang Internasional/ Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang Internasional, nasional dan lokal	0 Pelaku Usaha/UKM									
3.30.05.1.01.03	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang	0 Pelaku Usaha/UKM									
3.30.05.1.01.04	Peningkatan Citra Produk Ekspor	jumlah produk yang ditingkatkan citranya	4 produk									
3.30.05.1.01.05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Potensi Ekspor yang dibina	120 Pelaku Usaha/UKM									
3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase penurunan barang beredar yang tidak sesuai standar	1%									
3.30.06.1.01	Pelaksanaan perlindungan Konsumen di seluruh daerah Kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan perlindungan konsumen di kabupaten/kota	5 Kabupaten/ Kota									

3.30.06.1. 01.01	Pemberdayaan Konsumen dan kelembagaan perlindungan Konsumen	Jumlah Permasalahan konsumen yang diselesaikan oleh BPSK	24 Permasalahan								
3.30.06.1. 01.02	Peningkatan Hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	Jumlah Rakor dengan instansi terkait yang dilaksanakan	10 Rakor								
3.30.06.1. 03	Pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa disluruh daerah kabupaten/kota	Jumlah Pengawasan yang dilakukan di kabupaten/kota	5 Kabupaten/ Kota								
3.30.06.1. 03.01	peningkatan kapasitas dan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan /atau jasa sesuai parameter ketentuan perlindungan konsumen	Jumlah Kegiatan Pengawasan yang dlakukan	10 Kegiatan								
3.30.04. 1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Persentase Jumlah Penyaluran Pupuk Bersubsidi	75%								
3.30.04. 1.03.01	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	12 Kali								

3.30.07	PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga	80%								
3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Kontribusi Produk Lokal yang Dipasarkan di Pasar Rakyat dan Ritel Modern	80%								
3.30.07.1.03.01	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang telah terfasilitasi dalam Penggunaan Produk dalam Negeri	0 pelaku usaha								
3.30.07.1.03.02	Sosialisasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah peserta Sosialisasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri	0 peserta								
3.30.07.1.03.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Pelaku Usaha yang memasarkan produk lokal dan menyampaikan data informasi perdagangan antar pulau	10 Pelaku Usaha								
3.31.02	Urusan Perindustrian										
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Perencanaan dan pembangunan industri yang terlaksana	17%								
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	jumlah Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3 Kegiatan								

3.31.02.1. 01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan	4 Kegiatan								
3.31.02.1. 01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	jumlah layanan sarana dan prasarana industri yang terbangun dan termanfaatkan	2 Sarana								
3.31.02.1. 01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	jumlah kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pemberdayaan Industri	2 kegiatan								
3.31.02.1. 01.05	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen yang disampaikan	0 Dokumen								
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase pengendalian bagi industri yang sudah berizin	30%								
3.31.03.1. 01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah industri yang memiliki izin IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	20 Perusahaan								

3.31.03.1. 01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah perusahaan yang di awasi	20 Perusahaan								
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional yang terlaksana	100%								
3.31.04.0 1	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah informasi industri yang dikelola dan dipantau	1 informasi								
3.31.04.0 1.02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah industri berizin yang terpublish di SIINAS	22 Perusahaan								
3.31.04.0 1.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah perusahaan yang dilakukan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri	20 Perusahaan								



## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada analisis kinerja pelayanan perangkat daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 dan sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 dan sesuai dengan tugas dan fungsi maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM maka tidak menerapkan SPM. Sehingga table 2.3 tidak dapat disajikan.

*Tabel 2.3*  
*Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah*

No	Indikator Tujuan/Sasaran	Indikator SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

### **2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Peran dan posisi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sangat penting dan strategis khususnya dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah menuju kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan, koordinasi, dan sinergi program dengan PD dalam lingkup Provinsi Kalimantan Utara maupun kementerian dan lembaga di tingkat pusat perlu ditingkatkan. Dengan potensi yang begitu besar yang ada di Provinsi Kalimantan Utara mulai dari sumber daya alam hingga sumber daya manusia yang sangat potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal sehingga belum bisa mencapai apa yang diharapkan oleh masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan masih banyak permasalahan dan hambatan lain yang akan dihadapi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM. Perlu digaris bawahi pula berkaitan dengan kondisi riil pelaku usaha bahwa kualitas SDM pelaku usaha bidang perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM masih terbatas. Kebanyakan pelaku usaha tersebut berpendidikan rendah dengan keahlian teknis, kompetensi, kewirausahaan, dan manajemen yang seadanya sehingga pengelolaan usaha baik dari sisi manajemen, teknis produksi, dan pemasaran pun masih lemah. Kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan juga masih lemah. Hal ini merupakan sebuah tantangan dan pesatnya perkembangan informasi teknologi merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing usaha.

Namun dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah terdapat permasalahan yang di hadapi, yaitu

- a. Rendahnya pertumbuhan sektor industri dapat dilihat data yang diperoleh dari BPS yaitu data pertumbuhan PDRB mengalami penurunan pada tahun 2019 pertumbuhan PDRB sektor industri sebesar 9.20% sementara pada tahun 2020 pertumbuhan PDRB sektor industri 9.15%. sehingga Laju pertumbuhan ADHK turun sebesar -3,85.
- b. Rendahnya pertumbuhan sektor perdagangan. Belum optimalnya penguasaan akses dan informasi pasar, jaringan kemitraan/kerjasama usaha serta mengembangkan keunggulan lokal. Belum terbangunnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif dan efisien. Distribusi barang kebutuhan pokok yang efektif dan efisien merupakan kebijakan umum pembangunan sektor perdagangan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian kinerja. Belum optimalnya sistem distribusi barang kebutuhan pokok dan strategis yang efektif dan efisien disebabkan karena belum memadainya sarana dan prasarana logistik. Permasalahan ini harus segera mendapatkan solusi, karena sistem distribusi bahan pokok yang tidak strategis menyebabkan kelangkaan dan harga barang pokok menjadi beragam. Rendahnya pertumbuhan sektor perdagangan juga dilihat dari laju pertumbuhan ADHK sektor perdagangan mengalami kenaikan sebesar 0,42% dibandingkan sektor-sektor lainnya kenaikan tersebut masih rendah.
- a. Lemahnya perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar. Konsumen sebagai pengguna barang dan jasa harus mendapat perlindungan. Perlindungan terhadap konsumen belum optimal karena kurangnya pengawasan barang beredar,

jasa. Selain itu penyebab lainnya masih rendahnya pemahaman pelaku usaha dan konsumen terhadap Undang-undang Perlindungan Konsumen, masih rendahnya kesadaran pedagang untuk menera-ulangkan UTTP, banyaknya kasus-kasus yang merugikan konsumen, terbatasnya jumlah petugas dibidang pengawasan dan pengaduan konsumen (BPSK). Banyaknya barang illegal yang masuk ke Indonesia karena Provinsi Kalimantan Utara berada di wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia sehinggalah pengawasan barang tersebut harus lebih ditingkatkan.

- b. Rendahnya Koperasi berkualitas dan terdapat UMKM yang produknya masih kurang bersaing. Peran koperasi sebagai penyangga perekonomian sebagian besar masih sangat diorientasikan oleh masyarakat sebagai tempat simpan pinjam. Koperasi sebagai pembina usaha bersama belum mampu berjalan dengan baik. Masih diperlukan peningkatan dalam pembinaan koperasi. Karena penertiban administrasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM sehingga beberapa koperasi dibubarkan sehingga jumlah koperasi mengalami penurunan dan data koperasi yang memiliki NIK 104 dari 755 Jumlah Koperasi yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Berdasarkan data dari Bank Indonesia Jumlah Kredit yang diakses oleh UMKM yang ada di Kalimantan Utara sebesar Rp 3,01 M masih sangat jauh dengan Jumlah kredit yang diakses oleh seluruh UMKM yang ada di Indonesia.

Dengan banyaknya permasalahan yang ada di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara, maka bis berdampak pada pencapaian visi misi kepala daerah yang sudah ditentukan. Karena dalam menyelesaikan berbagai

masalah tersebut diperlukan kerja keras dan juga biaya yang sangat banyak, sedangkan anggaran yang tersedia sangat minim. Dengan semua kekurangan dan keterbatasan bukan alasan untuk menyerah, tapi sebagai tantangan untuk mendapat peluang yang sangat baik di masa depan.

## 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Bagian ini menyajikan perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dalam Renja Perangkat Daerah pada tahun 2022. Persandingan ini disajikan pada tabel berikut :

*Tabel 2.4  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022  
Provinsi Kalimantan Utara*

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				14.582.769	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				14.882.769
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				14.582.769	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				14.882.769

		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	11.732.769	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	100%	11.732.769
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	17 Dokumen	400.000	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	17 Dokumen	400.000
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kalimantan Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	300.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kalimantan Utara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	300.000

2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kalimantan Utara	Jumlah Laporan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	13 Dokumen	50.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kalimantan Utara	Jumlah Laporan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	13 Dokumen	50.000
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kalimantan Utara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	50.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kalimantan Utara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Dokumen	50.000
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah disediakan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>9.407.000</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah disediakan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>9.407.000</b>
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bulungan	Jumlah layanan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	8.007.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Bulungan	Jumlah layanan gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	8.007.000



5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Bulungan	Jumlah layanan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	1.400.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Bulungan	Jumlah layanan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	1.400.000
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>247.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>247.000</b>
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Bulungan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	80 Stel	67.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Bulungan	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	80 Stel	67.000

7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kalimantan Utara dan Luar Kalimantan Utara	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 Orang	180.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kalimantan Utara dan Luar Kalimantan Utara	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12 Orang	180.000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	12 Bulan	<b>945.769</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan	12 Bulan	<b>945.769</b>
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bulungan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	13 unit	64.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bulungan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	13 unit	64.000
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bulungan	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 Bulan	23.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bulungan	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 Bulan	23.000

10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Bulungan	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	225.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Bulungan	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	225.000
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Bulungan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	65.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Bulungan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	65.000
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bulungan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2160 Eksemplar	11.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kabupaten Bulungan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2160 Eksemplar	11.000
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bulungan	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 kali	557.769	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bulungan	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 kali	557.769

		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0
14		Pengadaan Mebel	Kabupaten Bulungan	Jumlah Mebeleur yang diadakan	0	0	Pengadaan Mebel	Kabupaten Bulungan	Jumlah Mebeleur yang diadakan	0	0
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	128.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	128.000
15		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bulungan	Jumlah layanan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	1640 pcs	12.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Bulungan	Jumlah layanan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	1640 pcs	12.000

16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bulungan	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Bulan	101.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Bulungan	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Bulan	101.000
17	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bulungan	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	15 Unit	15.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Bulungan	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	15 Unit	15.000
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>605.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>605.000</b>

18	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bulungan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	0 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bulungan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	0 Unit	0
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bulungan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya	15 Unit	180.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Bulungan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya	15 Unit	180.000
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bulungan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dilakukan pemeliharaan/direhabilitasi	4 Ruangan	425.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Bulungan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dilakukan pemeliharaan/direhabilitasi	4 Ruangan	425.000

		<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>		<b>persentase Jumlah koperasi yang melakukan RAT</b>	<b>18,28</b>	<b>Rp 180.000</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>		<b>persenta se Jumlah koperasi yang melakuk an RAT</b>	<b>18,28</b>	<b>Rp      200.000</b>
		<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>		<b>Persentase Koperasi yang tertib administrasi</b>	<b>60%</b>	<b>Rp 180.000</b>	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaann ya Lintas Daerah Kabupaten/Kot a dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>		<b>Persenta se Koperasi yang tertib administ rasi</b>	<b>60%</b>	<b>Rp      180.000</b>
21		Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Kabupaten/ Kota Se- Kalimantan Utara (Koperasi Lintas Kabupaten dalam Provinsi Kalimantan Utara)	Jumlah Koperasi yang dilakukan pembinaan , pengawasan dan pemeriksaan	50 Koperasi	Rp 180.000	Meningkatka n Akuntabilitas , Kepercayaa n, Kepatuhan, Kesinambun gan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar- Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Kabupaten/ Kota Se- Kalimantan Utara (Koperasi Lintas Kabupaten dalam Provinsi Kalimantan Utara)	Jumlah Koperasi yang dilakukan pembina an , pengawa san dan pemeriks aan	50 Koperasi	Rp      180.000

		<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>		Persentase pengurus/pengawas yang menyampaikan RAT	50%	Rp 120.000	<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>		Persentase pengurus/pengawas yang menyampaikan RAT	50%	Rp 400.000
		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah pengurus, Pengawas dan anggota Koperasi yang bersertifikat	50 Peserta	Rp 120.000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah pengurus, Pengawas dan anggota Koperasi yang bersertifikat	50 Peserta	Rp 400.000
22		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kabupaten Bulungan	Jumlah Pengurus, Pengawas dan anggota Koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan Perkoperasian	50 Peserta	Rp 120.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kabupaten Bulungan	Jumlah Pengurus, Pengawas dan anggota Koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan Perkoperasian	50 Peserta	Rp 120.000



		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>		<b>Persentasi UMKM yang mengakses KUR</b>	<b>54,67</b>	<b>750.000</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>		<b>Persentasi UMKM yang mengakses KUR</b>	<b>54,67</b>	<b>750.000</b>
		<b>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</b>		<b>Jumlah UMKM yang mendapatkan KUR</b>	<b>55 UMKM</b>	<b>750.000</b>	<b>Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan</b>		<b>Jumlah UMKM yang mendapatkan KUR</b>	<b>55 UMKM</b>	<b>750.000</b>

23	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	5 Kabupaten / Kota	Jumlah UMKM yang difasilitasi dalam mengakses KUR	55 UMKM	750.000	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	5 Kabupaten / Kota	Jumlah UMKM yang difasilitasi dalam mengakses KUR	55 UMKM	750.000
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>		Persentase UMKM yang diberikan pelatihan peningkatan daya saing dan fasilitasi pemasaran hasil produk UMKM	3,5%	Rp 1.800.000	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>		Persentase UMKM yang diberikan pelatihan peningkatan daya saing dan fasilitasi pemasaran hasil produk UMKM	3,5%	Rp 1.800.000

		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		Jumlah Usaha Kecil yang meningkat menjadi Usaha Menengah	31	Rp 1.800.000	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah		Jumlah Usaha Kecil yang meningkat menjadi Usaha Menengah	31	Rp 1.800.000
24		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	5 Kabupaten / Kota	Jumlah UMKM yang diberikan pelatihan/pendampingan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya manusia, serta Design dan Teknologi	360	Rp 1.800.000	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	5 Kabupaten / Kota	Jumlah UMKM yang diberikan pelatihan/pendampingan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya manusia, serta Design dan Teknologi	360	Rp 1.800.000
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>				6.565.000	<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>				6.565.000
		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>				5.965.000	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>				5.965.000

		<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>		kontribusi nilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) dalam 1 (satu) tahun	90%	150.000	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>		kontribusi nilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) dalam 1 (satu) tahun	90%	150.000
		<b>Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)</b>		Jumlah Penggunaan Form Certificate of Origin (COO)/Surat Keterangan Asal (SKA) dalam 1 (satu) Tahun	2652	150.000	<b>Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)</b>		Jumlah Penggunaan Form Certificate of Origin (COO)/Surat Keterangan Asal (SKA) dalam 1 (satu) Tahun	2652	150.000
25		Koordinasi dan sinkronisasi Layanan Penerbitan Layanan Penerbitan SKA	Tarakan dan Nunukan	Jumlah Pelaku Usaha yang terlayani	70 Pelaku Usaha	150.000	Koordinasi dan sinkronisasi Layanan Penerbitan Layanan Penerbitan SKA	Tarakan dan Nunukan	Jumlah Pelaku Usaha yang terlayani	70 Pelaku Usaha	150.000

		<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>		Persentase Sarana Perdagangan Yang terbangun	25%	3.150.000	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>		Persentase Sarana Perdagangan Yang terbangun	25%	3.150.000
		<b>Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas</b>		Jumlah Pembangunan dan pusat distribusi regional dan provinsi yang dikelola	1 Lokasi	3.150.000	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas</b>		Jumlah Pembangunan dan pusat distribusi regional dan provinsi yang dikelola	1 Lokasi	3.150.000
26		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Kab. Malinau dan Kab. Nunukan	Jumlah sarana dan prasarana pusat distribusi provinsi yang disediakan atau dibangun	17 Lokasi	3.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Kab. Malinau dan Kab. Nunukan	Jumlah sarana dan prasarana pusat distribusi provinsi yang disediakan atau dibangun	17 Lokasi	3.000.000
27		Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Kota Tarakan	Jumlah pembinaan dan pengendalian pusat distribusi yang dilaksanakan	0 Kegiatan	150.000	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Kota Tarakan	Jumlah pembinaan dan pengendalian pusat distribusi yang dilaksanakan	0 Kegiatan	150.000

		<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>		<b>Persentase Inflasi Pangan Bergejolak</b>	<b>3 ± 1</b>	<b>Rp 1.100.000</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>		<b>Persenta se Inflasi Pangan Bergejola k</b>	<b>3 ± 1</b>	<b>Rp 1.100.000</b>
		<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi</b>		<b>Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar waktu</b>	<b>6%</b>	<b>Rp 600.000</b>	<b>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi</b>		<b>Persenta se Stabilitas Harga Barang Kebutuh an Pokok dan Barang Penting antar waktu</b>	<b>6%</b>	<b>Rp 600.000</b>
28		Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	5 Kabupaten / Kota	Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Waktu	<13%	Rp 300.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaa n Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	5 Kabupaten / Kota	Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuha n Pokok Antar Waktu	<13%	Rp 300.000
29		Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	5 Kabupaten / Kota	Koefisien Variasi Harga Barang Penting Antar Waktu	0	Rp 300.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaa n Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	5 Kabupaten / Kota	Koefisien Variasi Harga Barang Penting Antar Waktu	0	Rp 300.000

		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar wilayah	6%	Rp 500.000	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar wilayah	6%	Rp 500.000
30		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	5 Kabupaten / Kota	Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Wilayah	0	Rp 300.000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	5 Kabupaten / Kota	Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Wilayah	0	Rp 300.000

31	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5 Kabupaten / Kota	Jumlah operasi pasar yang dilaksanakan	10 Kali	200.000	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5 Kabupaten / Kota	Jumlah operasi pasar yang dilaksanakan	10 Kali	200.000
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>		Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor Kalimantan Utara	16%	Rp 795.000	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>		Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor Kalimantan Utara	16%	Rp 795.000
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi		Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi	196 Pelaku Usaha	Rp 795.000	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi		Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi	196 Pelaku Usaha	Rp 795.000



33	Pameran Dagang Internasional/ Nasional	Luar Negeri dan Luar Kaltara	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang Internasional, nasional dan lokal	0 Pelaku Usaha/UKM	Rp 100.000	Pameran Dagang Internasional / Nasional	Luar Negeri dan Luar Kaltara	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang Internasional, nasional dan lokal	0 Pelaku Usaha/UKM	Rp 100.000
34	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Luar Kaltara	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang	0 Pelaku Usaha/UKM	Rp 100.000	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Luar Kaltara	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang	0 Pelaku Usaha/UKM	Rp 100.000
35	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kalimantan Utara	jumlah produk yang ditingkatkan citranya	4 produk	Rp 200.000	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kalimantan Utara	jumlah produk yang ditingkatkan citranya	4 produk	Rp 200.000
36	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Kalimantan Utara	Jumlah Pelaku Usaha Potensi Ekspor yang dibina	120 Pelaku Usaha/UKM	Rp 395.000	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Kalimantan Utara	Jumlah Pelaku Usaha Potensi Ekspor yang dibina	120 Pelaku Usaha/UKM	Rp 395.000

		<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>		Persentase penurunan barang beredar yang tidak sesuai standar	1%	Rp 600.000	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>		Persentase penurunan barang beredar yang tidak sesuai standar	1%	Rp 600.000
		<b>Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>		Jumlah pelaksanaan perlindungan konsumen di kabupaten/kota	5 Kabupaten/ Kota	Rp 400.000	<b>Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>		Jumlah pelaksanaan perlindungan konsumen di kabupaten/kota	5 Kabupaten / Kota	Rp 400.000
37		Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan	Jumlah Permasalahan konsumen yang diselesaikan oleh BPSK	24 Permasalahan	Rp 200.000	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan	Jumlah Permasalahan konsumen yang diselesaikan oleh BPSK	24 Permasalahan	Rp 200.000
38		Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Rakor dengan instansi terkait yang dilaksanakan	10 Rakor	Rp 200.000	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Rakor dengan instansi terkait yang dilaksanakan	10 Rakor	Rp 200.000

		<b>Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>		Jumlah Pengawasan yang dilakukan di kabupaten/kota	5 Kabupaten/Kota	Rp 120.000	<b>Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota</b>		Jumlah Pengawasan yang dilakukan di kabupaten/kota	5 Kabupaten/Kota	Rp 120.000
39		Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Kegiatan Pengawasan yang dilakukan	10 Kegiatan	Rp 120.000	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Kegiatan Pengawasan yang dilakukan	10 Kegiatan	Rp 120.000
		<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya</b>		<b>Persentase Jumlah Penyaluran Pupuk Bersubsidi</b>	75%	80.000	<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya</b>		<b>Persentase Jumlah Penyaluran Pupuk Bersubsidi</b>	75%	80.000

40	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	12 Kali	80.000	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	12 Kali	80.000
	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>		Persentase Kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga	80%	Rp 170.000	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>		Persentase Kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga	80%	Rp 170.000
	<b>Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>		Persentase Kontribusi Produk Lokal yang Dipasarkan di Pasar Rakyat dan Ritel Modern	80%	Rp 170.000	<b>Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>		Persentase Kontribusi Produk Lokal yang Dipasarkan di Pasar Rakyat dan Ritel Modern	80%	Rp 170.000

41	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	5 Kabupaten / Kota	Jumlah pelaku usaha yang telah terfasilitasi dalam Penggunaan Produk dalam Negeri	0 pelaku usaha	Rp -	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	5 Kabupaten / Kota	Jumlah pelaku usaha yang telah terfasilitasi dalam Penggunaan Produk dalam Negeri	0 pelaku usaha	Rp -
42	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	5 Kabupaten / Kota	Jumlah peserta Sosialisasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri	0 peserta	Rp -	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	5 Kabupaten / Kota	Jumlah peserta Sosialisasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri	0 peserta	Rp -
43	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang memasarkan produk lokal dan menyampaikan data informasi perdagangan antar pulau	10 Pelaku Usaha	Rp 170.000	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang memasarkan produk lokal dan menyampaikan data informasi perdagangan antar pulau	10 Pelaku Usaha	Rp 170.000

		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>				<b>600.000</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>				<b>600.000</b>
		<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>		Persentase Perencanaan dan pembangunan industri yang terlaksana	17%	Rp 300.000	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>		Persenta se Perencan aan dan pembang unan industri yang terlaksan a	17%	Rp 300.000
		<b>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>		jumlah Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3 Kegiatan	300.000	<b>Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi</b>		jumlah Penyusun an, Penerapa n, dan Evaluasi Rencana Pembang unan Industri Provinsi	3 Kegiatan	300.000
44		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan	4 Kegiatan	100.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaa n Kebijakan Percepatan Pengemban gan, Penyebaran dan Perwilayaha n Industri	5 Kabupaten / Kota	Jumlah Koordina si, Sinkronis asi, dan Pelaksan aan Kebijakan	4 Kegiatan	100.000

45	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kabupaten Bulungan	jumlah layanan sarana dan prasarana industri yang terbangun dan termanfaatkan	2 Sarana	100.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kabupaten Bulungan	jumlah layanan sarana dan prasarana industri yang terbangun dan termanfaatkan	2 Sarana	100.000
46	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Kabupaten / Kota	jumlah kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pemberdayaan Industri	2 kegiatan	100.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Kabupaten / Kota	jumlah kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pemberdayaan Industri	2 kegiatan	100.000
47	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	5 Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen yang disampaikan	0 Dokumen	0	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	5 Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen yang disampaikan	0 Dokumen	0
	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>		Persentase pengendalian bagi industri yang sudah berizin	30%	Rp 100.000	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>		Persentase pengendalian bagi industri yang sudah berizin	30%	Rp 100.000

		<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi</b>		Jumlah industri yang memiliki izin IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	20 Perusahaan	100.000	<b>Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi</b>		Jumlah industri yang memiliki izin IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	20 Perusahaan	100.000
48		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	5 Kabupaten / Kota	Jumlah perusahaan yang diawasi	20 Perusahaan	100.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	5 Kabupaten / Kota	Jumlah perusahaan yang diawasi	20 Perusahaan	100.000
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>		Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional yang terlaksana	100%	Rp 200.000	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>		Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional yang terlaksana	100%	Rp 200.000



		<b>Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</b>		Jumlah informasi industri yang dikelola dan dipantau	1 informasi	200.000	<b>Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</b>		Jumlah informasi industri yang dikelola dan dipantau	1 informasi	200.000
49		Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	5 Kabupaten / Kota	Jumlah industri berizin yang terpublis di SIINAS	22 Perusahaan	100.000	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	5 Kabupaten / Kota	Jumlah industri berizin yang terpublis di SIINAS	22 Perusahaan	100.000
50		Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	5 Kabupaten / Kota	Jumlah perusahaan yang dilakukan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri	20 Perusahaan	100.000	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	5 Kabupaten / Kota	Jumlah perusahaan yang dilakukan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri	20 Perusahaan	100.000
<b>TOTAL PAGU ANGGARAN</b>						<b>21.147.769</b>	<b>TOTAL PAGU ANGGARAN</b>				<b>21.447.769</b>

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat merupakan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota. Karena musrenbang Provinsi baru akan dilaksanakan maka Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan tidak dapat disajikan pada tabel 2.4.

*Tabel 2.4*  
*Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan*  
*Tahun 2022 Provinsi Kalimantan Utara*

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1					
2					
dst.					

### BAB III

#### TUJUAN DAN SASARAN

#### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

##### 3.1.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun 2022 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Dukungan terhadap prioritas nasional berdasarkan hasil rakortekrenbang selengkapannya dapat dilihat dalam Lampiran II Surat Edaran Penyusunan Ranwal Renja.

*Tabel 3.1*  
*Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022*  
*yang mendukung Prioritas Nasional*

No	Prioritas Nasional	Program yang mendukung Prioritas Nasional berdasarkan BA Rakortekrenbang	Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional berdasarkan BA Rakortekrenbang	Nama Sub Kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional berdasarkan BA Rakortekrenbang	Lokasi kegiatan
1	2	3	4	5	
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Program perencanaan dan pembangunan industri	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	5 Kabupaten / Kota

				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Kabupaten / Kota
		Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Tarakan dan Nunukan
		Program pengembangan ekspor	Penyelenggaraa n Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Pameran Dagang Internasional/Nasion al	Luar Negeri dan Luar Kaltara
				Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Luar Kaltara
				Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kalimanta n Utara
				Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Kalimanta n Utara
		Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan

			Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/ atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	5 Kabupaten / Kota
				Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	5 Kabupaten / Kota
		Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	5 Kabupaten / Kota
		Program standarisasi dan perlindungan konsumen	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	5 Kabupaten / Kota
		Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	5 Kabupaten / Kota
		Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	5 Kabupaten / Kota

		Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	5 Kabupaten / Kota
		Program pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	5 Kabupaten / Kota
2.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	-	-	-	-
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	5 Kabupaten / Kota
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	-	-	-	-

5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	-	-	-	-
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	-	-	-	-
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>11 Program</b>	<b>12 Kegiatan</b>	<b>17 Sub Kegiatan</b>	

### 3.1.2 Telaahan terhadap prioritas provinsi

Telaahan terhadap prioritas provinsi dilakukan terhadap:

- Sepuluh prioritas daerah tahun 2022 dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- Target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi Perangkat Daerah pemangku Bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar.

Hasil penelaahan terhadap prioritas daerah dituangkan dalam Tabel 4 sebagai berikut:

*Tabel 3.2*  
*Indikasi program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2022*  
*Yang Mendukung Sepuluh Prioritas Daerah*

No	Prioritas Daerah	Nama Program yang mendukung prioritas daerah	Nama Kegiatan yang mendukung prioritas daerah	Nama Sub Kegiatan yang mendukung prioritas daerah	Lokasi kegiatan
1	Mewujudkan pembangunan PLTA Sungai Mentarang dan Sungai Kayan	-	-	-	
2	Mewujudkan pembangunan KIPPI	Program perencanaan dan pembangunan industri	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan dalam Rangka Mendukung Penguatan Industri Nasional dan Perwilayahan Industri	5 Kabupaten / Kota
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	5 Kabupaten / Kota
3	Mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan pembangunan pertanian dalam arti luas meliputi; perkebunan, pertanian tanaman pangan dan hortikultura,	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Pembinaan dan Pengendalian Pisat Distribusi dan Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Kota Tarakan



	peternakan, perikanan sungai, laut, dan memberi jaminan perlindungan kepada petani tambak melalui mekanisme pengadaan fasilitas dan regulasi disetiap kabupaten/kota.	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	5 Kabupaten / Kota
				Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	5 Kabupaten / Kota
			Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	5 Kabupaten / Kota
				Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5 Kabupaten / Kota

4	Meningkatkan terwujudnya konektivitas kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah terpencil dalam rangka membangun desa menata kota, dengan membangun infrastruktur darat, laut, sungai udara dan informasi teknologi di setiap kabupaten/kota.	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Kab. Malinau dan Kab. Nunukan
5	Meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan di kabupaten/kota.	-	-	-	
6	Mewujudkan pembangunan ekonomi melalui diversifikasi produk dan keunggulan komparatif setiap kabupaten/kota	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesiambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya kepada Anggota dan Masyarakat	5 Kabupaten / Kota

		Program pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
		Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan
		Program pengembangan ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Pameran Dagang Lokal	Luar Negeri dan Luar Kaltara
				Pameran Dagang Internasional/Nasional	Kalimantan Utara
				Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Luar Kaltara
				Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kalimantan Utara
				Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Kalimantan Utara

		Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	5 Kabupaten / Kota
				Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	5 Kabupaten / Kota
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	5 Kabupaten / Kota
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kabupaten Bulungan

		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Kabupaten Bulungan
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	
				Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	
		Program perencanaan dan pembangunan industri	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kalimantan Utara

7	Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan wajib belajar 16 tahun yang berwawaskan.	-	-	-	-
8	Mewujudkan pengadaan balai latihan kerja, perluasan lapangan kerja, kesempatan usaha dan ekonomi kreatif bagi kaum milineal.	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaan nya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	5 Kabupaten / Kota
		Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	5 Kabupaten / Kota

		Program pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	5 Kabupaten / Kota
		Program pengembangan ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Pameran Dagang Lokal	Kalimantan Utara
				Pameran Dagang Internasional/Nasional	Luar Negeri dan Luar Kaltara
				Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Kalimantan Utara
				Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kalimantan Utara
				Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Kalimantan Utara
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Koordinasi, sinkronisasi pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	5 Kabupaten / Kota

9	Mewujudkan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM di setiap kabupaten/kota.	Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	5 Kabupaten / Kota
10	Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan pada semua tingkatan satuan pendidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.	-	-	-	
<b>JUMLAH</b>		<b>12 Program</b>	<b>13 Kegiatan</b>	<b>25 Sub Kegiatan</b>	



### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Sesuai dengan rencana strategis tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut ;

Tujuanstrategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara :

1. Meningkatkan Daya Saing Industri dengan melaksanakan Program Kegiatan yang bisa meningkatkan pertumbuhan PDRB di sektor industri. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri program ini mendukung pembangunan KIPI yang ada pada prioritas daerah yang ditetapkan oleh Gubernur. Program Pengendalian Izin Usaha Industri dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Program ini mendukung sistem nasional untuk menertibkan perizinan industri dan data industri di seluruh Indonesia.
2. Meningkatkan Daya Saing Perdagangan. Dengan melaksanakan 6 Program yaitu Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen untuk melakukan pengawasan barang dan jasa yang beredar agar sesuai perundang-undangan, Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan untuk membantu perizinan para pelaku ekspor agar mudah mendapatkan SKA, Program Pengembangan Ekspor untuk meningkatkan produk unggulan yang berdaya saing ekspor dan melakukan pembinaan para pelaku ekspor, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan untuk memudahkan masyarakat melaksanakan jual beli dan dalam menyediakan barang pokok penting yang di seluruh wilayah termasuk daerah perbatasan,

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting untuk menjaga stabilisasi barang pokok penting di Kalimantan Utara dan Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri berupa sosialisasi penggunaan produk dalam negeri.

3. Meningkatkan Pertumbuhan Koperasi dan UKM berkualitas. pengembangan produk unggulan daerah Provinsi Kalimantan Utara melalui peningkatan daya saing produk UKM. Hal tersebut dilaksanakan melalui pengembangan produk unggulan daerah, peningkatan akses permodalan bagi UKM, perluasan jaringan pemasaran dan distribusi usaha, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia UKM dan untuk menunjang tujuan tersebut didukung oleh 3 Program yaitu Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Dan Program Pengembangan Umkm.

Adapun sasaran utama yang harus dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara dalam jangka waktu tertentu, terdiri atas :

1. Meningkatnya pertumbuhan sektor industri
2. Meningkatnya Pertumbuhan sektor perdagangan
3. Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan terhadap produk beredar
4. Meningkatnya pertumbuhan koperasi dan UKM sehat



## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dengan adanya program dan kegiatan, diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, menjawab tantangan pembangunan, serta memaksimalkan peluang yang ada. Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara yang direncanakan untuk periode tahun 2022 beserta prakiraan maju 2023 disajikan dalam tabel berikut :

*Tabel 4.1*

*Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023*

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Urutan Prioritas Perangkat Daerah	Prakiraan Maju Rencana 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (000)	Sumber Dana			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				16.402.769.239					16.324.371.428
2,17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				16.402.769.239					16.324.371.428
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran		100%	11.732.769.239				100%	12.268.000.000
2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		17 Dokumen	400.000.000				17 Dokumen	400.000.000

2.17.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Kalimantan Utara	2 Dokumen	300.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			2 Dokumen	300.000.000
2.17.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	Kalimantan Utara	13 Dokumen	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			13 Dokumen	50.000.000
2.17.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kalimantan Utara	2 Dokumen	50.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			2 Dokumen	50.000.000
<b>2.17.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>9.407.000.000</b>				<b>12 Bulan</b>	<b>9.420.000.000</b>
2.17.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Bulungan	12 Bulan	8.007.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			12 Bulan	8.020.000.000

2.17.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah layanan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Bulungan	12 Bulan	1.400.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			12 Bulan	1.400.000.000
2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		12 Bulan	247.000.000				12 Bulan	200.000.000
2.17.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Kabupaten Bulungan	80 Stel	67.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			0	-
2.17.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kalimantan Utara dan Luar Kalimantan Utara	12 Orang	180.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			15 Orang	200.000.000
2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disediakan		12 Bulan	945.769.239				12 Bulan	1.469.000.000

2.17.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kabupaten Bulungan	13 Unit	64.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			13 Unit	64.000.000
2.17.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kabupaten Bulungan	12 Bulan	23.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			12 Bulan	23.000.000
2.17.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Bulungan	12 Bulan	225.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			12 Bulan	225.000.000
2.17.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Bulungan	12 Bulan	65.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			12 Bulan	145.000.000
2.17.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kabupaten Bulungan	2160 Eksemplar	11.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			2160 Eksemplar	12.000.000
2.17.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Bulungan	130 kali	557.769.239	Dana Alokasi Umum (DAU)			130 kali	1.000.000.000



2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan		0	-				1 Kegiatan	35.000.000
2.17.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Kabupaten Bulungan	0	-	Dana Alokasi Umum (DAU)			23 unit	35.000.000
2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12 Bulan	128.000.000				12 Bulan	137.000.000
2.17.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah layanan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	Kabupaten Bulungan	1640 pcs	12.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			1640 pcs	12.000.000
2.17.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kabupaten Bulungan	12 Bulan	101.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			12 Bulan	110.000.000

2.17.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kabupaten Bulungan	15 Unit	15.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			15 Unit	15.000.000
<b>2.17.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan jasa pemeliharaannya</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>605.000.000</b>				<b>12 Bulan</b>	<b>607.000.000</b>
2.17.01.1.09.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang diadakan	Kabupaten Bulungan	0 Unit	-	Dana Alokasi Umum (DAU)			0	-
2.17.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajaknya	Kabupaten Bulungan	15 Unit	180.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			15 Unit	180.000.000

2.17.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dilakukan pemeliharaan/direhabilitasi	Kabupaten Bulungan	4 Ruangan	425.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)			4 Ruangan	427.000.000
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	persentase Jumlah koperasi yang melakukan RAT		18,28	200.000.000				23,58	330.000.000
2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Persentase Koperasi yang tertib administrasi		60%	180.000.000				64%	330.000.000

2.17.03.1.01.01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	Jumlah Koperasi yang dilakukan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan	Kabupaten/ Kota Se-Kalimantan Utara (Koperasi Lintas Kabupaten dalam Provinsi Kalimantan Utara)	50 Koperasi	180.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Prioritas Nasional No. 1, Prioritas Daerah No. 6 dan Misi Gubernur No. 10	50 Koperasi	330.000.000
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pengurus/pengawas yang menyampaikan RAT		50%	120.000.000				54%	400.000.000

2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dal 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pengurus, Pengawas dan anggota Koperasi yang bersertifikat		50 Peserta	120.000.000				50 Peserta	400.000.000
2.17.03.1.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Pengurus, Pengawas dan anggota Koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan Perkoperasian	Kabupaten Bulungan	50 Peserta	120.000.000	Dana Alokasi Khusus (DAK)		Prioritas Daerah No. 6 dan Misi Gubernur No. 10	50 Peserta	400.000.000
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentasi UMKM yang mengakses KUR		54,67	2.550.000.000				56,67	825.000.000

2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang mendapatkan KUR		55 UMKM	750.000.000				58 UMKM	825.000.000
2.17.07.1.01.01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah UMKM yang difasilitasi dalam mengakses KUR	5 Kabupaten / Kota	55 UMKM	750.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Prioritas Nasional No. 1, Prioritas Daerah No. 9	58 UMKM	825.000.000
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase UMKM yang diberikan pelatihan peningkatan daya saing dan fasilitasi pemasaran hasil produk UMKM		3,5%	1.800.000.000				5,0%	2.501.371.428

2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Menengah	Jumlah Usaha Kecil yang meningkat menjadi Usaha Menengah		31	1.800.000.000				51	2.501.371.428
2.17.08.1.01.01	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah UMKM yang diberikan pelatihan/pendampingan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya manusia, serta Design dan Teknologi	5 Kabupaten / Kota	360	1.800.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Prioritas Nasional No. 1, Prioritas Daerah No. 6	480	2.501.371.428
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				6.485.000.000					25.620.000.000
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				5.885.000.000					22.470.000.000

3.30	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	kontribusi nilai ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal (SKA) dalam 1 (satu) tahun		90%	150.000.000				93%	275.000.000
3.30.02.1.04	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	Jumlah Penggunaan Form Certificate of Origin (COO)/Surat Keterangan Asal (SKA) dalam 1 (satu) Tahun		2.652	150.000.000				-	275.000.000
3.30.02.1.04.01	Koordinasi dan sinkronisasi Layanan Penerbitan Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Pelaku Usaha yang terlayani	Tarakan dan Nunukan	70 Pelaku Usaha/UKM	150.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Prioritas Nasional No. 1, Prioritas Daerah No. 6	75 Pelaku Usaha/UKM	275.000.000
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Perdagangan Yang terbangun		25%	3.150.000.000				25%	17.600.000.000



3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas	Jumlah Pembangunan dan pusat distribusi regional dan provinsi yang dikelola		1 Lokasi	3.150.000.000				1 Lokasi	17.600.000.000
3.30.03.1.01.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana pusat distribusi provinsi yang disediakan atau dibangun	Kab. Malinau dan Kab. Nunukan	17 Lokasi	3.000.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Prioritas Daerah No. 4	17 Lokasi	17.600.000.000
3.30.03.1.01.01	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah pembinaan dan pengendalian pusat distribusi yang dilaksanakan	Kota Tarakan	0 Kegiatan	150.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Prioritas Daerah No. 3	0	-
3.30.04	STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Inflasi Pangan Bergejolak		3 ± 1	1.100.000.000				3 ± 1	1.100.000.000

3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar waktu		6%	600.000.000				6%	600.000.000
3.30.04.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Waktu	5 Kabupaten / Kota	<13%	300.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Prioritas Nasional Np. 1 dan Prioritas Daerah No. 3	<13%	300.000.000
3.30.04.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Koefisien Variasi Harga Barang Penting Antar Waktu	5 Kabupaten / Kota	0	300.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Prioritas Daerah No. 3	<13%	300.000.000
3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antar wilayah		6%	500.000.000				6%	500.000.000

3.30.04.1.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota	Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Antar Wilayah	5 Kabupaten / Kota	0	300.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Prioritas Nasional No. 1 dan Prioritas Daerah No. 3	<15%	300.000.000
3.30.04.1.02.02	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah operasi pasar yang dilaksanakan	5 Kabupaten / Kota	10 Kali	200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Prioritas Daerah No. 3	10 Kali	200.000.000
3.30.05	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekspor Kalimantan Utara</b>		16%	795.000.000				8%	1.645.000.000
3.30.05.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi		196 Pelaku Usaha	795.000.000				196 Pelaku Usaha	1.645.000.000

3.30.05.1.01.01	Pameran Dagang Internasional/ Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang Internasional, nasional dan lokal	Luar Negeri dan Luar Kaltara	20 Pelaku Usaha/UKM	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Prioritas Nasional No. 1 dan Prioritas Daerah No. 6	20 Pelaku Usaha/UKM	750.000.000
3.30.05.1.01.03	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang	Luar Kaltara	6 Pelaku Usaha/UKM	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Prioritas Daerah No. 6	6 Pelaku Usaha/UKM	300.000.000
3.30.05.1.01.04	Peningkatan Citra Produk Ekspor	jumlah produk yang ditingkatkan citranya	Kalimantan Utara	4 produk	200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Prioritas Nasional No. 1 dan Prioritas Daerah No. 6	4 produk	200.000.000
3.30.05.1.01.05	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Potensi Ekspor yang dibina	Kalimantan Utara	120 Pelaku Usaha/UKM	395.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Prioritas Nasional No. 1 dan Prioritas Daerah No. 6	120 Pelaku Usaha/UKM	395.000.000
3.30.06	<b>Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</b>	<b>Persentase penurunan barang beredar yang tidak sesuai standar</b>		1%	520.000.000				1%	800.000.000
3.30.06.1.01	Pelaksanaan perlindungan Konsumen di seluruh daerah Kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan perlindungan konsumen di kabupaten/kota		5 Kabupaten/Kota	400.000.000				5 Kabupaten/Kota	500.000.000

3.30.06.1.01.01	Pemberdayaan Konsumen dan kelembagaan perlindungan Konsumen	Jumlah Permasalahan konsumen yang diselesaikan oleh BPSK	Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan	24 Permasalahan	200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Prioritas Nasional No. 1	24 Permasalahan	200.000.000
3.30.06.1.01.02	Peningkatan Hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen	Jumlah Rakor dengan instansi terkait yang dilaksanakan	5 Kabupaten / Kota	10 Rakor	200.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Prioritas Nasional No. 1	15 Rakor	300.000.000
3.30.06.1.03	Pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa disluruh daerah kabupaten/kota	Jumlah Pengawasan yang dilakukan di kabupaten/kota		5 Kabupaten/Kota	120.000.000				5 Kabupaten/Kota	300.000.000

3.30.06.1.03.01	peningkatan kapasitas dan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan /atau jasa sesuai parameter ketentuan perlindungan konsumen	Jumlah Kegiatan Pengawasan yang dilakukan	5 Kabupaten / Kota	10 Kegiatan	120.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Prioritas Nasional No. 1 dan Prioritas Nasional No. 3	10 Kegiatan	300.000.000
3.30.04.1.03	<b>Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya</b>	<b>Persentase Jumlah Penyaluran Pupuk Bersubsidi</b>		75%	250.000.000				80%	250.000.000
3.30.04.1.03.01	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	5 Kabupaten / Kota	12 Kali	80.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Prioritas Nasional No. 1	12 Kali	250.000.000
3.30.07	<b>PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>Persentase Kontribusi produk dalam negeri dalam konsumsi rumah tangga</b>		80%	170.000.000				80%	1.050.000.000

3.30.07.1.03	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase Kontribusi Produk Lokal yang Dipasarkan di Pasar Rakyat dan Ritel Modern		80%	170.000.000				80%	1.050.000.000
3.30.07.1.03.01	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang telah terfasilitasi dalam Penggunaan Produk dalam Negeri	5 Kabupaten / Kota	0 pelaku usaha	-	Dana Alokasi Umum (DAU)		Prioritas Nasional No. 1 dan Prioritas Daerah No. 6	20 pelaku usaha	350.000.000
3.30.07.1.03.02	Sosialisasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah peserta Sosialisasi peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri	5 Kabupaten / Kota	0 peserta	-	Dana Alokasi Umum (DAU)		Prioritas Daerah No. 6	250 peserta	400.000.000
3.30.07.1.03.03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Pelaku Usaha yang memasarkan produk lokal dan menyampaikan data informasi perdagangan antar pulau	5 Kabupaten / Kota	10 Pelaku Usaha	170.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Prioritas Daerah No. 6	10 Pelaku Usaha	300.000.000

3.31.02	Urusan Perindustrian				600.000.000					3.150.000.000
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Perencanaan dan pembangunan industri yang terlaksana		17%	300.000.000				33%	2.350.000.000
3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	jumlah Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi		3 Kegiatan	300.000.000				3 Kegiatan	2.350.000.000
3.31.02.1.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan	5 Kabupaten / Kota	4 Kegiatan	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Prioritas Nasional No. 1 dan Prioritas Daerah No. 2	1 Kegiatan	350.000.000
3.31.02.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	jumlah layanan sarana dan prasarana industri yang terbangun dan termanfaatkan	Kabupaten Bulungan	2 Sarana	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Prioritas Daerah No. 6	2 Sarana	700.000.000



3.31.02.1.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	jumlah kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pemberdayaan Industri	5 Kabupaten / Kota	2 kegiatan	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Prioritas Nasional No. 1	2 kegiatan	1.000.000.000
3.31.02.1.01.05	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen yang disampaikan	5 Kabupaten / Kota	0 Dokumen	0	Dana Alokasi Umum (DAU)		Prioritas Nasional No. 1	1 dokumen	300.000.000
3.31.03	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	<b>Persentase pengendalian bagi industri yang sudah berizin</b>	<b>5 Kabupaten / Kota</b>	<b>30%</b>	<b>Rp 100.000.000</b>				<b>40%</b>	<b>300.000.000</b>
3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Jumlah industri yang memiliki izin IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi		20 Perusahaan	100.000.000				21 Perusahaan	300.000.000

3.31.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah perusahaan yang diawasi	5 Kabupaten / Kota	20 Perusahaan	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Prioritas Daerah No. 6	21 Perusahaan	300.000.000
3.31.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional yang terlaksana</b>		<b>100%</b>	<b>200.000.000</b>				<b>100%</b>	<b>500.000.000</b>
3.31.04.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah informasi industri yang dikelola dan dipantau		1 informasi	200.000.000				1 informasi	500.000.000
3.31.04.01.02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah industri berizin yang terpublikasi di SIINAS	5 Kabupaten / Kota	22 Perusahaan	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Prioritas Daerah No. 6	25 Perusahaan	200.000.000

3.31.04.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah perusahaan yang dilakukan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri	5 Kabupaten / Kota	20 Perusahaan	100.000.000	Dana Alokasi Umum (DAU)		Prioritas Daerah No. 6	21 Perusahaan	300.000.000
<b>TOTAL PAGU ANGGARAN</b>					<b>21.147.769.239</b>					<b>41.944.371.428</b>

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Tahun 2022 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 – 2026 untuk tahun 2022, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2022

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara. Dokumen ini merupakan rangkaian rencana kegiatan prioritas dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2022.

Dengan tersusunnya renja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Utara tahun 2022 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan didalam dokumen RKPD yang sekaligus akan mendukung perwujudan visi kepala daerah periode 2021-2026 ; “***Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera***”.

Tanjung Selor, 18 Agustus 2021

Plt. Kepala Dinas



H. Hasriyani, SH., MM  
Pembina TK. I, IV/b

NIP. 19730717 200312 2 008